

BASIS EKONOMI ASEAN (Indonesia)

Abstraksi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) diyakini sebagai tonggak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Asia Tenggara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak tidak hanya dari kalangan elit pemerintahan atau konglomerasi, akan tetapi masyarakat ekonomi kecil dan menengah juga harus mengambil peran. Masyarakat ekonomi kecil dan menengah khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan tenaga kerja Indonesia (TKI) akan menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan AEC dimana arus perpindahan tenaga kerja akan semakin bebas dan intens. Sebagian besar wilayah ASEAN memiliki teritori laut yang sangat luas. Hal ini harus dipandang sebagai modal besar untuk mengintegrasikan ekonomi Asia Tenggara dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan yang faktanya sangat melimpah. Kekayaan laut di wilayah ASEAN dapat dimanfaatkan sebagai komoditas dan juga objek wisata yang penyelenggaraannya melibatkan semua pihak termasuk dalam hal ini nelayan dan wirausaha kecil dan menengah. Program ini ditujukan sebagai basis kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara untuk menanggulangi arus bebas ketenagakerjaan. Salah satu metodenya adalah dengan menyatukan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan sekaligus bertujuan sosial yaitu dengan mengintegrasikan ekonomi kreatif, pemanfaatan sumberdaya alam, pariwisata, dan pembiayaan masyarakat secara menyeluruh dalam satu wadah yang mana kerangka pemikirannya dapat diaplikasikan diseluruh wilayah ASEAN.

Isi

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan AEC masih menimbulkan kekhawatiran dan rasa pesimistis bagi sebagian masyarakat Indonesia ketimbang manfaat dan peluangnya. Hal ini karena terdapat tantangan yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Berdasarkan cetak birunya, AEC memiliki lima elemen inti seperti arus barang bebas (*free flow of goods*), arus layanan bebas (*free flow of services*), arus investasi bebas (*free flow of investment*), aliran modal bebas (*free flow of capital*), dan arus bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labor*). Namun, pada saat empat elemen pertama tersebut diadaptasi oleh masing-masing negara ASEAN, maka elemen ke-5 akan menjadi tantangan terbesar, yaitu penyebaran tenaga kerja terampil. Hal ini terjadi karena perbedaan kemampuan sumber daya manusia di masing-masing negara ASEAN. Sebagai contoh, apabila arus barang masuk ke Indonesia secara bebas atau dengan regulasi yang lebih sederhana maka akan mengancam keberadaan produsen lokal. Pada akhirnya akan terjadi masalah dalam kondisi ketenagakerjaan.

Ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penyebaran tenaga kerja di ASEAN yaitu:

1. Perbedaan keterampilan

Tingkat keterampilan tenaga kerja di setiap negara ASEAN berbeda-beda sehingga memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial dalam proses penyebarannya. Ketika tenaga kerja ASEAN mendapat kebebasan untuk berkompetisi diluar negaranya, maka secara langsung mereka akan bersaing dengan tenaga kerja yang berada di negara tujuan mereka. Apabila tenaga kerja yang masuk memiliki keterampilan yang lebih baik maka tenaga kerja lokal akan terancam kehidupannya. Hal ini akan

menjadi cikal bakal pergesekan sosial yang harus ditemukan pemecahannya sejak dini.

2. Perbedaan tingkat upah

Upah merupakan perhatian utama bagi para tenaga kerja. Dengan akses bebas pada pasar ketenagakerjaan maka kecenderungan untuk bekerja di negara yang menerapkan kebijakan upah lebih tinggi akan sangat menggiurkan khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan rendah. Tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, Brunei, dan Singapur pada umumnya hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga atau buruh kasar. Di dalam negeri, jenis pekerjaan tersebut sangat banyak, namun tingkat upah yang diterapkan sangat rendah. Oleh karena itu banyak tenaga kerja nasional yang rela bekerja di negara-negara tetangga dengan keterampilan terbatas namun mendapatkan upah yang lebih tinggi. Dengan keterampilan dan pendidikan rendah, permasalahan yang sering timbul adalah tindak kekerasan dan pelecehan yang dialami para tenaga kerja tersebut.

Mereka yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, keterbatasan ide untuk membuat produk yang lebih kompetitif, dan tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan bisnis akan menemukan beban yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas *AEC*. Orang-orang ini adalah tenaga kerja yang bekerja sebagai nelayan tradisional, petani tradisional, penjual dipasar tradisional, dan sebagainya. Tanpa kualitas dan kreatifitas serta tanpa mengetahui bagaimana cara bersaing, mereka akan mudah terpinggirkan. Oleh karena itu kita perlu mengarahkan tenaga kerja tersebut untuk memahami dan menggeluti industri kreatif atau pada kewirausahaan. Dalam hal ini kita seharusnya memberikan perhatian lebih terkait dengan kemampuan mandiri angkatan kerja untuk mendirikan usaha sendiri agar mampu bertahan dalam arus perdagangan bebas. Proyek semacam ini akan menjadi elemen penanggulangan dan pendukung untuk mewujudkan *AEC* yang saling menguntungkan.

Lebih dari itu, apabila ASEAN hanya mengandalkan jumlah tenaga kerja yang melimpah dalam bidang produksi masal maka cita-cita untuk berkompetisi dengan kawasan lain seperti Uni Eropa akan sangat sulit tercapai. Disisi lain, ada kekhawatiran bahwa negara-negara ASEAN akan terjebak kedalam *economic bubble* seperti yang terjadi pada Tiongkok.

Analisis

Untuk mencegah dampak negatif dari *AEC*, Indonesia dapat memanfaatkan beberapa strategi persaingan yaitu *comparative advantage*, *value added*, *knowledge transfer*, *technology transfer*, dan *people awareness*. *Comparative advantage* dan *value added* merupakan elemen yang paling penting dalam memenangkan persaingan ekonomi. Dalam hal ini Indonesia harus memahami secara mendalam apa yang bisa ditawarkan yang tidak dimiliki oleh negara lain dan tentunya memiliki nilai tambah untuk mengurangi hambatan persaingan. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan tenagakerja dalam bidang riset, pengembangan dan pemasaran yang dapat diperoleh melalui *knowledge transfer* dan *technology transfer*. Tidak hanya dengan mengundang investor untuk datang dan berinvestasi, tetapi Indonesia harus lebih proaktif dengan mengirimkan utusan untuk mempelajari proses managerial, produksi dan pemasaran dari hulu ke hilir. Kemudian *people awareness*, masyarakat harus diberikan pemahaman melalui sosialisasi atau pelatihan bahwa saat ini kesempatan untuk memperoleh pasar sudah

sangat luas dengan adanya AEC, dimana mereka dapat dengan mudah menawarkan produk keluar negeri khususnya dalam pasar ASEAN. Strategi tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila Indonesia belum menemukan jenis industri yang harus diprioritaskan.

Dari segi perdagangan barang, dengan adanya fungsi pasar tunggal maka transaksi aliran barang antar negara ASEAN akan lebih bebas tanpa dibebani peraturan yang berarti. Tentu saja hal ini merupakan kemajuan positif dalam pengembangan ekonomi kawasan. Pada Sektor non-Migas, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN semakin mengecil khususnya dalam rentan waktu 2015-2016 dari USD -1.5 miliar menjadi USD 1.2 Miliar¹. Namun kecenderungan untuk memperoleh surplus neraca merupakan hal yang sangat sulit untuk saat ini karena jenis produk barang ekspor impor antar negara ASEAN masih sebagian besar sama. Dibutuhkan produk dengan tingkat *comparative advantage* yang tinggi untuk memenangkan pasar atau paling tidak untuk memperkecil defisit neraca. Comparative advantage bisa tercipta melalui pemberdayaan industri kreatif melalui kewirausahaan.

Fokus utama dari program ini misalnya menciptakan wirausahawan baru dalam menghasilkan produk perikanan dan kelautan. Hal ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo yang mengedepankan sektor kemaritiman. Indonesia dapat memanfaatkan industri kreatif di sektor makanan yakni produk hasil laut siap saji untuk menjadi andalan dalam memenangkan pasar bebas ASEAN. Indonesia dapat mempelajari industri tersebut dari negara-negara Skandinavia yang memiliki banyak produk perikanan. Dengan demikian program ini diyakini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi nelayan tradisional. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka ide yang dapat dituangkan adalah dengan mendirikan pusat penelitian kelautan dan perikanan dimana perusahaan swasta atau BUMN di ASEAN yang berfokus pada industri produk perikanan dan kelautan dapat berkolaborasi dengan nelayan lokal dalam mengembangkan produk tertentu.

Mengapa nelayan? Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina dan Indonesia hidup di bawah standar kehidupan yang layak. Aktivitas melaut sepanjang hari tidak selalu menghasilkan jumlah tangkapan yang besar. Penghasilan yang mereka dapatkan bahkan terkadang hanya cukup untuk memberi makan keluarga mereka. Berdasarkan *Asianwes.it*, ribuan nelayan diperbudak di beberapa kapal nelayan ilegal yang ingin memiliki sebanyak mungkin ikan dari daerah pesisir Asia Tenggara. Misalnya di Thailand, menurut data pemerintah, tingkat cedera anak di bawah 15 tahun yang bekerja secara ilegal di kapal tongkang dan kapal nelayan jauh lebih tinggi dibanding mereka yang dieksploitasi di industri minyak dan gas. Menurut *International Labor Organization* dan *Asia Foundation*, 20% nelayan muda menjadi korban kecelakaan, sementara dari sektor lain hanya 8,4%. Sementara itu, sebagian besar negara maju menjadikan perikanan sebagai usaha yang sangat menguntungkan sehingga bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi nelayan. Ini bukan hanya karena mereka telah diperlengkapi dan dididik, namun pemerintah menciptakan banyak kesempatan dan menerapkan program tertentu untuk membantu nelayan tentang bagaimana menciptakan nilai tambah bagi produk perikanan.

¹ <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country>

Kita dapat menginisiasi proyek ini, khususnya di wilayah Kota Baubau dan daerah sekitar kepulauan Buton. Ada beberapa kampung nelayan yang bisa menjadi tempat awal percobaan seperti Bonebone, Topa, Batauga, dan Kadatua dimana perikanan sebagai mata pencaharian mereka selama berabad-abad. Namun, metode penangkapan ikan mereka saat ini masih sama dengan cara kakek buyut mereka. Misalnya di Kadatua, hanya beberapa orang yang memiliki kapal nelayan yang biasa disewa oleh beberapa nelayan. Selama 14 hari memancing mereka hanya mendapatkan Rp 1,5-2 juta, sedangkan pemilik kapal mendapat Idr 10-15 Mio. Jumlah itu hanya cukup untuk menutupi makanan sehari-hari.

Kita juga akrab dengan nelayan tradisional yang melintasi perbatasan negara secara ilegal. Hal ini terjadi bukan hanya karena mereka tidak memiliki pengetahuan menggunakan perangkat untuk mengenali garis batas negara, namun juga karena kurangnya pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya terdekat di sekitar mereka. Melalui proyek ini, kami berharap bisa mengurangi jumlah nelayan yang berpenghasilan kecil, mengurangi perbudakan dikapal-kapal nelayan dan nelayan yang melintasi perbatasan negara secara ilegal.

Selain itu, menyediakan sumber pembiayaan bagi nelayan, masyarakat kecil dan menengah sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan AEC. Mendirikan suatu lembaga penyaluran kredit mikro tanpa bunga akan memberikan manfaat secara menyeluruh.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program ini diharapkan sebagai proyek percontohan yang akan diterapkan kemudian oleh masing-masing negara ASEAN. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut sekitar 5 juta km², yang bahkan lebih luas dari pada daratan itu sendiri. Namun, sumber daya di bawahnya belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk kemakmuran. Saat ini, pengetahuan, fasilitas produksi, strategi pasar dan peralatan yang tepat adalah masalah yang belum terpecahkan. Berikut adalah pandangan awal dan rekomendasi bagaimana program ini akan berjalan:

1. Penciptaan Produk Perikanan dan Kelautan

Sejak MoU ditandatangani oleh Universitas Dayanu Ikhsanuddin dan Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, banyak program yang dapat dilakukan untuk kepentingan ASEAN. Pemangku kepentingan terkait dapat bekerjasama dengan fakultas yang sesuai di universitas tersebut untuk mengembangkan pusat penelitian atas produk-produk perikanan dan sistem pembudidayaan hasil laut, entitas lain juga di mungkinkan untuk terlibat dalam program tersebut. Dalam pemberdayaan sumber daya kelautan, mahasiswa fakultas perikanan dan kelautan dapat berkolaborasi dengan salah satu perusahaan makanan laut di ASEAN untuk menciptakan produk seperti produk makanan ringan, berbahan dasar rumput laut, ikan kaleng, daging ikan beku fillet, burger ikan siap saji, fish fillet siap saji dan nuget ikan teri instant dengan populasinya melimpah. Dalam hal ini, nelayan juga terlibat langsung dalam hal pembudidayaan dan penangkapan. Jika sekelompok nelayan memiliki permintaan yang berkelanjutan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang produk makanan / makanan laut di negara-negara ASEAN, di mana produk tersebut diekspor ke seluruh dunia, keuntungan bersama akan tercipta. Dengan demikian maka interaksi ekonomi antar negara ASEAN

tidak terbatas pada ekspor apa yang kita miliki dan impor dari apa yang tidak kita miliki, melainkan menciptakan sebuah usaha yang didasarkan pada kekuatan masing-masing entitas.

Dalam program ini sasarannya bukan hanya perusahaan yang telah mapan dan memiliki posisi didalam pasar, namun perusahaan mikro dan menengah yang belum memiliki fasilitas dan mitra untuk pengembangan produk. Pemerintah melalui tangan BUMN sebagai salah satu aktor penting dalam program ini dapat berperan sebagai penyedia fasilitas seperti laboratorium untuk penelitian makanan, unit produksi, pusat perancangan kemasan, hingga strategi pemasaran dan saluran pasar. Semua dalam satu fasilitas yang bisa digunakan oleh pelaku usaha di ASEAN untuk memprakarsai produk baru. Pada saat produk yang diinginkan telah tercipta dan mereka mengenali penggunaan fasilitas produksi, mereka dapat mengembangkan produk sendiri.

Lalu muncul beberapa pertanyaan, pertama, bagaimana cara menutup biaya operasional pusat penelitian ini? Salah satu caranya adalah dengan membebankan beberapa persen dari total biaya operasional kepada perusahaan atau entitas perusahaan yang menggunakan fasilitas ini. Mereka tidak harus membayar biaya apapun diawal. Namun, saat produk mereka mulai mendapat tempat dipasar dan mulai memperoleh pendapatan dari hasil penjualan, pusat penelitian memiliki hak untuk menarik retribusi sekitar 10% dari penghasilan netto mereka (dapat disesuaikan). Pada dasarnya biaya operational yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berasal dari pengguna PPN dari produk yang mereka jual. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa menarik lebih banyak calon pelaku usaha untuk industri makanan laut? Ada dua cara, pertama adalah dengan mengembangkan produk baru terlebih dahulu dan membuka rekrutmen bagi pelaku bisnis yang cakap yang bisa menjalankan bisnis dengan baik dan menguntungkan. Yang kedua adalah dengan mencari ide segar tentang cara membuat produk dengan bahan dasar ikan atau sumber daya laut lainnya dan mengajak para pelaku bisnis untuk pengembangan produk.

2. Pariwisata

Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang mempromosikan pariwisata secara besar-besaran melalui "Pesona Indonesia". Kawasan sekitar dimana program ini akan dijalankan memiliki banyak potensi sumber daya untuk pariwisata, terutama objek laut dan bawah laut. Namun, tempat ini belum dipromosikan dengan baik ke seluruh dunia. Harapan saya adalah bahwa lokasi yang indah ini bisa menghasilkan pendapatan dari pengunjung domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam. Untuk melaksanakan rencana ini, kita memerlukan lebih dari sekedar fasilitas pariwisata yang memadai, yaitu kebutuhan untuk membangun fasilitas modern tanpa mengabaikan pemandangan alam. Ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bersama dengan proyek utamanya.

Tempat ini masih di bawah administrasi Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau, dekat dengan Wakatobi dengan kurang lebih 7 jam perjalanan darat dan laut. Dengan demikian juga pantas untuk mengembangkan pusat wisata. Sekitar 1 jam perjalanan laut dari pesisir pantai barat Kota Baubau ada sebuah pulau tak berpenghuni dengan luas

sekitar 90 hektar, 20Ha bisa digunakan untuk mengembangkan fasilitas wisata seperti resort atau cottage. Misalnya, kita bisa mengembangkan 10 cottage dengan lebar masing-masing 100 m². Manajemen dan staf dapat diperoleh dari warga sekitar. Beberapa mahasiswa dari negara-negara ASEAN yang berasal dari jurusan pariwisata juga dapat terlibat sebagai pemegang, sementara itu mereka juga dapat berinteraksi dengan mahasiswa dan komunitas pemuda setempat untuk saling mengenal agar tercipta pemahaman budaya dan rasa persaudaraan yang lebih erat. Kemudian, penghasilan dari fasilitas pariwisata ini selain untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan, juga dapat dialokasikan untuk fasilitas dana sosial. Misalnya sebagai beasiswa untuk anak-anak nelayan atau dapat dialokasikan dalam bentuk kredit tanpa bunga bagi nelayan, petani, ataupun pemilik home industry untuk mengembangkan bisnisnya.

3. Fasilitas Kredit Mikro Tanpa Bunga

Seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya bahwa pemanfaatan objek wisata dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat yang tinggal disekitar daerah tersebut, tidak hanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung, namun juga mereka yang tidak bersentuhan secara langsung. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan suatu lembaga penyaluran kredit mikro tanpa bunga. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan manfaat secara menyeluruh dari aktifitas pariwisata. Untuk mengalokasikan dana secara efisien dan transparan kita perlu menggunakan instrumen perkreditan yang telah teruji bagi golongan masyarakat kecil dan menengah. Karya seorang Muhammad Yunus telah teruji dalam bidang perkreditan rakyat. Idenya adalah dengan memberikan sejumlah kecil pinjaman dengan jangka waktu cicilan/pelunasan yang fleksibel dan tanpa persyaratan yang rumit seperti kredit pada umumnya. Semua transaksi dan arus kas akan tersedia 24 jam melalui website, yang bisa diawasi oleh siapapun. Dengan kata lain, kita menciptakan sumber pembiayaan sosial kemasyarakatan dengan memanfaatkan pariwisata.